

## HUBUNGAN SIPIL-MILITER DI CHILE PASCA AUGUSTO PINOCHET, 1990-2006

**Nur Aliyah Zainal**

Dosen Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat & Politik

UIN Alauddin Makassar

Email: liaeman7876@gmail.com

### **Abstract**

This paper is about the efforts of civilian government of Chile to subordinate its military since 1990 until 2006. Every government has its own strategy to do so. The strategies of every civilian government seek for supremacy, but the corporate interest of military often restricts it. The Chilean government's policies that intervene the military institution and damage the corporate interest could be a negative impact on the armed forces. Policies of civilian governments to military especially Pinochet's issue and human right abuses have a strong impact on instability of the country. Finally, the defense policy of "division of sphere" of Ricardo Lagos not to intervene the military and also the commitment of military especially army to be more professional post Pinochet, have been successful in establishing civil supremacy in Chile.

Key words: civil-military relations, corporate interest, civilian supremacy, defense policy

### **Pendahuluan**

Penghujung abad ke 20 ditandai oleh tiga perkembangan historis yang telah mengubah politik dunia yaitu menyebarnya demokrasi, jatuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin. Fenomena yang saling berkaitan erat ini mengubah kerangka hubungan internasional serta situasi politik domestik di banyak negara. Salah satu perkembangan tersebut yaitu demokrasi, terjadi pula di beberapa negara di Amerika Latin dan salah satunya adalah Chile. Sejak tahun 1973, Chile berada di bawah kekuasaan militer pimpinan Jenderal Augusto Pinochet, yang melakukan kudeta terhadap presiden sebelumnya Salvador Allende (1970-1973).

Pada tahun 1990 terjadi transisi dari pemerintahan yang otoriter ke

demokratis berdasarkan hasil pemilu 1989 yang memenangkan koalisi *Concertacion de Partidos por la Democracia* (concertacion). Tiga presiden Chile pasca transisi, yaitu, Patricio Aylwin, Eduardo Frei dan Ricardo Lagos, mempunyai tugas untuk mensubordinasi militer yang sebelumnya sangat kuat dalam politik Chile.

Tercapainya subordinasi terhadap militer dipengaruhi oleh sikap ataupun kebijakan pemerintah. Kebijakan atau sikap tersebut apakah mempengaruhi secara positif atau negatif kepentingan institusi atau *corporate interests* militer itu sendiri. Pendekatan *corporate interest* dititikberatkan pada motif birokrasi militer. Militer merespon secara rasional lingkungannya, berusaha keras mengurangi yang tidak penting dan memaksimalkan segala hal yang berhubungan dengan power, sumber daya dan otonominya. Beberapa hal seperti kasus Pinochet dan mempertahankan *Amnesty Law 1978* merupakan kepentingan militer Chile yang seringkali berbenturan dengan kebijakan pemerintahan sipil. Hal inilah yang ingin dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini, dengan menarik sebuah permasalahan “bagaimana respon politik demokratik terhadap hubungan sipil-militer di Chile dalam kurun waktu 1990-2006?”

### Hubungan Sipil-Militer

Pada hakikatnya hubungan sipil-militer didefinisikan secara longgar sebagai interaksi dan hubungan timbal balik antara angkatan bersenjata dengan berbagai segmen dalam masyarakat dimana militer tersebut berfungsi. **Andrew J. Rodhes** dalam tulisannya “Chilean Civil-Military Relations” mengatakan hubungan sipil-militer adalah pemerintahan sipil sebagai agen masyarakat yang harus mengontrol militer sehingga pemahaman terhadap demokrasi harus lebih luas.<sup>1</sup>

Sementara menurut **Michael C. Desch**, para analis politik yang mempelajari hubungan sipil-militer sering tidak mencapai kata sepakat mengenai kriteria apa yang harus digunakan untuk menandai apakah hubungan itu “baik” atau “buruk”. Beberapa analis mengatakan bahwa hubungan sipil-militer yang baik akan ada jika militer berada dalam bidang profesionalnya secara ketat dan hubungan itu buruk manakala militer berada di luar bidangnya. Dalam kasus yang ekstrim, negara yang mengalami kudeta – militer merebut kekuasaan secara langsung akan dikatakan bahwa negara itu

---

<sup>1</sup>Andrew J. Rodhes, *Chilean Civil-Military Relations*, [www.geocities.com/ajrhodes](http://www.geocities.com/ajrhodes). Diakses 4 Oktober 2006

memiliki hubungan sipil-militer terburuk. Analisis lainnya menyarankan untuk melihat apakah sistem yang ada menghasilkan pilihan kebijakan yang masuk akal di bidang militer. Sehingga, cara terbaik untuk mengukur hubungan sipil-militer adalah memeriksa bagaimana pemimpin sipil dan militer menangani perbedaan kebijakan antar mereka sendiri: hubungan sipil-militer yang terbaik akan ditemukan di negara di mana otoritas sipil mampu memenangkan perselisihan kebijakan dengan militer tersebut.<sup>2</sup>

Sedangkan, **Samuel Huntington** mengajukan 2 metode yang dia sebut dengan *Objective civilian control* dan *subjective civilian control* yang dipakai untuk melihat bagaimana hubungan sipil-militer di suatu negara berlangsung. *Objective civilian control* adalah memaksimalkan profesionalisme militer. Lebih tepatnya adalah pembagian kekuasaan politik diantara militer dan kelompok-kelompok sipil untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi munculnya sikap dan perilaku profesional di antara para anggota korps perwira. Menurut metode ini yang paling mungkin menghasilkan hubungan sipil yang sehat. Lagi pula, orientasi militer kepada ancaman eksternal mengurangi kecenderungan mereka untuk mencampuri politik domestik, karena orientasi ini tergantung pada masa perang total. Dalam keadaan seperti itu pemimpin sipil memiliki kapasitas yang besar untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi kebebasan peperangan. Singkatnya, fokus eksternal akan melahirkan pola yang optimal bagi hubungan sipil-militer, dimana pemimpin sipil dapat mempercayai kepatuhan militer. Model hubungan sipil-militer yang menggunakan kontrol obyektif saat ini dipakai oleh negara-negara yang menganut paham demokrasi.<sup>3</sup>

Proses subordinasi militer membawa pemerintahan sipil berhadapan dengan kepentingan lembaga militer itu sendiri. Militer akan tetap mempertahankan kepentingannya tersebut ketika berhadapan dengan kebijakan militer pemerintahan sipil jika dianggap tidak menguntungkan bagi lembaga tersebut, yang kemungkinan membawa militer untuk melakukan intervensi dalam politik. **Eric Nordlinger**<sup>4</sup> mengatakan bahwa motif terbesar militer untuk melakukan intervensi adalah mempertahankan kepentingan organisasinya (*corporate interests*). *Corporate interests* mengacu pada anggaran

<sup>2</sup> Michael C. Desc, *Ancaman Lingkungan dan Misi Militer*, dalam Larry Diamond & Marc F. Plattner, *Hubungan Sipil-Militer & Konsolidasi Demokrasi*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2001), hal. 19-20.

<sup>3</sup> Samuel Huntington, *Mereformasi Hubungan Sipil-Militer*, dalam Larry Diamond & Marc F. Plattner (ed.), *Hubungan Sipil-Militer & Konsolidasi Demokrasi*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2001), hal. 4.

<sup>4</sup> Brian D. Taylor, *Russia's Passive Army, Rethinking Military Coups*, 1999, [www.csis.org/media/isis\\_pub/ruseus/wp/014/pdf.pdf](http://www.csis.org/media/isis_pub/ruseus/wp/014/pdf.pdf), diakses 23 Mei 2009

yang cukup, otonomi organisasi/lembaga, mempertahankan tanggungjawabnya dalam menghadapi gangguan dari kelompok-kelompok kepentingan yang menjadi lawannya, dan keberlangsungan institusinya. Ketika *corporate interests*nya diancam oleh pihak-pihak dari luar militer, seperti politisi sipil ikut campur dalam promosi kepangkatan perwira, militer cenderung bereaksi dan intervensi dalam politik untuk mempertahankan *corporate interest*nya.

Robinson Rojas<sup>5</sup> kemudian membuat skema yang memperlihatkan perbedaan profesionalisme militer, sebagai berikut :

Tabel. 1

**Perbedaan antara *old* dan *new professionalism of military***

<b>Indikator</b>	<b>Old Professionalism</b>	<b>New Professionalism</b>
Keamanan yang eksis	Keamanan eksternal	Keamanan internal
Sikap masyarakat sipil terhadap pemerintah	Semua masyarakat mendukung pemerintah	Beberapa golongan masyarakat menentang pemerintah dan kemudian menjadi "musuh internal"
<i>Skill</i> militer yang dibutuhkan	<i>Skill</i> khusus yang tinggi bukan kemampuan politik	<i>Skill</i> ekonomi, politik dan militer yang tinggi
<i>Scope</i> tindakan profesionalisme militer	Terbatas hanya pada hubungan militer	Tidak terbatas, militer dihubungkan dengan politik
Dampak sosialisasi profesionalisme	Secara politik, militer posisinya netral	Militer berpolitik
Dampak dalam hubungan sipil-militer	Militer tidak berpolitik dan terdapat kontrol sipil	Peran militer yang luas dalam politik
Sikap militer terhadap tantangan politik	Netral	Militer melihat semua tantangan politik sebagai ancaman terhadap keamanan dalam negeri

## Dinamika Hubungan Sipil - Militer di Chili

### a. Kudeta Militer 1973

<sup>5</sup>Robinson Rojas, Notes On The Doctrine of National Security, [www.rojasdatabank.org/natsec1.htm](http://www.rojasdatabank.org/natsec1.htm), diakses 10 Agustus 2007

Pada tahun 1973 terjadi kudeta oleh militer yang menggulingkan Pemerintahan Allende. Kudeta disebabkan oleh karena kondisi ekonomi Chile makin memburuk pada masa Allende dan pinjaman luar negeri merupakan masalah yang makin pelik. Politik luar negeri Chile yang makin condong ke Uni Soviet dan Eropa Timur serta Kuba mengecewakan pihak-pihak yang non-sosialis. Di dalam negeri tidak hanya terjadi polarisasi politik, bahkan terjadi fragmentasi politik antar-partai yang menyulitkan sistem pengambilan keputusan nasional. Meningkatnya kekerasan di dalam negeri dan krisis ekonomi juga menjadi penyebab turunnya legitimasi pemerintahan Allende.

Kudeta oleh militer terjadi setelah Mahkamah Agung Chile mengirimkan surat protes terbuka kepada pemerintahan Allende atas penolakan terhadap keputusan pengadilan untuk mengembalikan kepemilikan yang diambil oleh pemerintah (nasionalisasi perusahaan). Kongres mengeluarkan sebuah keputusan yang menuduh pemerintah yang "biasa" melanggar konstitusi dan hukum yang berlaku, sehingga pada tanggal 11 september 1973, angkatan darat (AD), angkatan laut (AL), angkatan udara (AU) dan kepolisian (carabineros) menyingkirkan Salvador Allende dalam waktu sehari. Istana presiden dibom yang mengakibatkan kematian Salvador Allende.

Penurunan Allende dari kekuasaan juga melibatkan CIA Amerika Serikat (meskipun kudeta tersebut dilakukan oleh orang-orang Chile) yang menurut hasil investigasi Senat AS bahwa antara tahun 1971-1973 CIA mengalirkan dana sekitar US\$ 8 juta untuk mendukung media untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah, memberikan kepada kelompok ekstrimis untuk melakukan penyerangan dan menyebarkan propaganda anti Allende di kalangan militer.<sup>6</sup> Untuk ketiga kalinya dalam sejarah Chile, kudeta militer terjadi lagi setelah sebelumnya terjadi pada tahun 1924 dan 1932.

#### b. Kepentingan Lembaga Militer Chile (*Corporate Interest*)

**Bengt Abrahamson** menyatakan bahwa angkatan bersenjata sama seperti organisasi lainnya yang memiliki tujuan yang ingin dicapai terutama pada keberlangsungan lembaga tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh **Amos Perlmutter** bahwa tujuan utama militer melakukan intervensi dalam politik berhubungan dengan orientasi dan peran lembaganya. Institusi militer berusaha keras mengontrol lembaganya secara internal dan melindunginya dari campur tangan pihak luar sehingga militer akan melakukan intervensi jika

---

<sup>6</sup>Paul E. Sigmun dalam Howard J. Wiarda dan Harvey F. Kline (eds.), *Latin America Politics and Development* (Third ed., Boulder, San Francisco & Oxford, 1990), *Op. Cit.*, hal. 208-210.

peran manajemen birokrasinya yang dikontrol secara internal tersebut terancam.<sup>7</sup>

Pada intinya, angkatan bersenjata sebagai institusi memiliki kepentingan sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan kemampuan koersifnya (paksaan), menghadapi musuh dari luar negara dan jika perlu musuh domestik juga. Untuk itu, militer memelihara standar lembaganya dan mengontrol sendiri anggaran, peralatan, disiplin dan persatuannya. Dalam hal ini, sikap pemerintah sipil terhadap *corporate interests* militer merupakan kunci utama dalam hubungan sipil-militer. Sikap pemerintah tersebut bisa merusak atau meningkatkan subordinasi militer. Kebijakan pemerintah terhadap militer dapat menguntungkan kepentingan institusi militer dengan memberikan insentif. Hal ini merupakan bujukan untuk mempengaruhi militer secara positif yang bisa terdiri atas kebijakan baru, perangkat hukum dan program-program untuk militer. Ada 4 hal yang merupakan *corporate interests* militer, yaitu :

1. Profesionalisme: prajurit merupakan bagian dari organisasi yang kompleks yang tidak hanya membentuk aturan dan prosedur bagi manajemen internalnya tapi juga memiliki standar yang berbeda tentang promosi dalam lembaga militer. Dalam hal ini, tujuan utama dari setiap anggota militer adalah mencapai karir tertinggi. Jika mengikuti jalur karir yang telah ada maka mereka akan mencapai posisi yang lebih tinggi dalam beberapa tahun. Untuk itu, mempertahankan otonomi internalnya merupakan tujuan fundamental militer. Mencampuri otonomi militer sekecil apapun itu dianggap sebagai serangan terhadap integritas profesi. Intervensi sipil ke dalam lembaga militer dapat memberikan dampak yang negatif dan meningkatkan perpecahan di antara anggota militer. Tingkat ancaman semakin tinggi jika konflik dengan sipil mempengaruhi integritas profesi militer dan melanggar aturan-aturan yang telah ada. Misalnya, promosi prajurit berdasarkan kriteria politik. Dalam hal ini, mempertahankan integritas merupakan syarat bagi pengembangan profesi.
2. Motif Ekonomi : Misi militer dan modernisasi lembaga merupakan hal-hal yang sangat penting bagi perkembangan institusi. Oleh karena itu, ketika anggaran atau upah personil militer dipotong maka dianggap sebagai

---

<sup>7</sup>Jorge Mario Battaglino, *Regime Stability and Civil-Military Relations in Argentina : A Process-Driven Explanation*, 2006,  
[http://www.ub.edu.ar/revistas\\_digitales/Politica\\_y\\_Diplomacia/jorge\\_battaglino.pdf](http://www.ub.edu.ar/revistas_digitales/Politica_y_Diplomacia/jorge_battaglino.pdf) diakses pada 24 Juni 2009.

- ancaman oleh militer dan membatasi prospek karir personil. Hal tersebut juga dapat meningkatkan tingkat ancaman. Sebaliknya, jika *budget* ditingkatkan maka dianggap sebagai dukungan terhadap militer.
3. Doktrin : Orientasi profesi militer yang sangat jelas adalah doktrin. Doktrin tersebut mempengaruhi sikap atau tingkah laku militer yang mana menetapkan hal-hal yang harus dikerjakan dan prosedur pelaksanaannya. Untuk itu, sifat doktrin militer dapat mempengaruhi model atau bentuk kontrol sipil. Sebagai contoh, budaya militer yang terdiri atas asumsi, ide, dan kepercayaan (*belief*) yang menentukan bagaimana militer harus beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya dan mengatur internal organisasinya, dimana hal-hal tersebut dapat menciptakan kondisi intervensi militer ke dalam politik atau tidak. Misi militer juga merupakan prinsip strategis yang berasal dari doktrin militer dan memberikan pengaruh besar terhadap hubungan sipil-militer suatu negara. Misi militer berkaitan dengan ancaman militer dan non-militer dan berhubungan dengan asal ancaman yaitu dari luar dan dalam negara.
  4. Hak Prerogatif : konsep ini mencakup pada semua bidang dimana militer sebagai institusi menganggap dirinya memiliki hak istimewa, formal maupun informal, untuk mengontrol secara efektif lembaga internalnya, memainkan peran yang lebih dari sekedar militer yaitu aparaturnegara, atau bahkan untuk membangun hubungan antara negara dengan politik atau masyarakat sipilnya, jika ini terjadi berarti tidak tercipta sebuah supremasi sipil. Loyalitas militer menguat jika orientasi general pemerintah terhadap angkatan bersenjata tidak berpengaruh pada kepentingan korporasinya.<sup>8</sup>

Keempat hal tersebut di atas juga menjadi bagian dari *corporate interests* militer Chile pasca Pinochet yang menjadi alat tawar militer yang menghambat penegakan supremasi sipil di Chile. Dalam tabel berikut ada beberapa kepentingan militer Chile yang sangat penting bagi lembaga tersebut untuk tetap dipertahankan.

Tabel 2.  
***Corporate Interests* militer Chile**

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

1. Hak Prerogatif militer Chile
2. Otonomi lembaga militer
3. Mempertahankan Amnesty Law 1978
4. Pengusutan pelanggaran HAM sebagai isu yang *low profile*
5. Penyatuan Augusto Pinochet dan militer

c. Hubungan Sipil-Militer Era Patricio Aylwin (1990-1994)

Dari penelitian yang penulis adakan diketahui bahwa supremasi sipil seringkali menemui hambatan ketika kebijakan militer pemerintahan sipil Chile terutama ketika Patricio Aylwin memerintah (1990-1994). Hal ini disebabkan oleh terjadi benturan kepentingan diantara keduanya. Aylwin yang menerapkan strategi *non-cooperation* (strategi yang tidak mengikutsertakan militer dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan hubungan sipil-militer dan kebijakan pertahanan). Dalam hal ini, pemerintah berusaha mensubordinasi militer dengan tidak meminta pendapat dari militer sendiri. Sipil menuntut peran militer yang profesional dan supremasi sipil atas militer. Sasarannya adalah membatasi pengaruh militer dalam area-area sipil dalam kebijakan militernya mendapatkan perlawanan dari pihak militer).<sup>9</sup> Dua peristiwa yaitu *Ejercicio de Enlace* dan *Boinazo* adalah sikap perlawanan terhadap kebijakan pemerintahan Aylwin untuk melakukan investigasi terhadap anak Augusto Pinochet yang dikenal dengan kasus cek dimana keuntungan putra Pinochet yang diterima dari penjualan senjata ke Kroasia dalam bentuk cek. Sebelum peristiwa *Ejercicio de Enlace*, Pinochet mengutus ketua penasihatnya, Jenderal Jorge Ballerino untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan, Patricio Rojas dalam rangka membicarakan masalah tersebut. Pertemuan itu hanya berlangsung singkat dan langsung ke sasaran pembicaraan. Ballerino diminta untuk menyampaikan kepada Pinochet untuk mundur dari jabatannya dan hal itu ditolak. Akibatnya, Pinochet meminta seluruh personil AD untuk kembali ke barak bersiap-siap untuk berperang (*Ejercicio de Enlace*). Penyelesaiannya, Jose Antonio Viera-Gallo (Presiden *house of deputies*) setuju untuk tidak mencantumkan keterlibatan Pinochet dan tidak mengetahui setiap aktivitas ilegalnya dalam laporan final Komisi Rettig (disebut Komisi Rettig diambil dari nama pimpinannya, Raul Rettig). Komisi ini dibentuk untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM pada masa Rezim Pinochet.

<sup>9</sup> Gregory Weeks, *Democratic Institutions and Civil-Military Relations: The Case of Chile*, Journal of Third World Studies, Spring 2001, [www.findarticles.com/p/articles/mi\\_qa3821/ai\\_n8930571](http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3821/ai_n8930571) diakses pada 25 Januari 2007.

Kasus ini kemudian dibicarakan dalam dewan keamanan negara yang akan memutuskan tuntutan yang tepat bagi Pinochet.<sup>10</sup>

Investigasi tersebut ditanggapi oleh Direktur Akademi Perang Chile, Kolonel Juan Emilio Cheyre membuat pernyataan kepada publik bahwa militer sebagai lembaga dan Jenderal Augusto Pinochet Ugarte tidak bisa dipisahkan dan tetap setia pada kepemimpinannya serta menyampaikan jika *ejercicio de enlace* tersebut akan diakhiri jika tidak ada lagi sikap atau tindakan yang memberi pengaruh terhadap lembaga militer karena kalau itu terjadi maka mereka mengancam untuk mengganggu keamanan nasional.

Peristiwa *Boinazo* (baret) muncul, tepatnya pada tanggal 28 Mei 1993 dimana 42 jenderal senior AD mengenakan seragam perang melakukan pertemuan di AD yang bangunannya berada di seberangan istana presiden. Setelah itu, AD mengumumkan *state of alert* atau negara dalam siaga dan 5 (lima) hari berikutnya seluruh perwira berada di barak dengan memakai seragam perang. Penyebab hal ini adalah kasus cek lagi yang sedang dalam investigasi yang melibatkan anak Pinochet. Pada tanggal 24 April 1993, Dewan Pertahanan Negara memutuskan untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Sementara pemerintah dan AD sepakat untuk mengurangi publikasi kasus ini tetapi pada tanggal 28 Mei 1993, surat kabar nasional *La Nacion* mengumumkan keputusan tersebut sebagai berita utama dan AD memandang hal ini sebagai awal kampanye politik melawan Pinochet. Selama dalam pemecahan kasus ini, AD mengajukan permintaan yaitu kasus ini tidak menjadi hal besar, pemerintah menunda lebih dari 100 keputusan administratif yang berada di departemen pertahanan, pemecahan konflik di dalam perusahaan AD (*Famae*), menutup kasus HAM yang melibatkan AD yang masih tertunda di pengadilan, menunda amandemen konstitusi dan meminta menteri pertahanan untuk mundur dari jabatannya.<sup>11</sup>

Pemerintah menerima sebagian dari permintaan tersebut. Kasus cek dipindahkan ke pengadilan lain untuk mengurangi publikasi, menyetujui penundaan undang-undang administratif di atas, membentuk komisi untuk menyelesaikan persoalan dalam *Famae* tapi pemerintah menolak permintaan AD agar menteri pertahanan mengundurkan diri. Dalam hal ini *corporate interests* militer tentang penyatuan Pinochet dan militer terganggu oleh kebijakan pemerintah tentang investigasi tersebut.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Claudio Fuentes, *Military and Politics : Weakness in Chilean Democracy*, [www.igc.org/Features/Chile/Chile5](http://www.igc.org/Features/Chile/Chile5), diakses 27 September 2006

d. Hubungan Sipil-Militer Era Eduardo Frei (1994-2000)

Ketika Eduardo Frei menjadi presiden, diterapkan strategi *engagement* yang cenderung mengikutkan militer dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah sipil percaya bahwa kerjasama adalah cara terbaik untuk mencapai subordinasi, dimana pemerintah sipil memasukkan opini militer dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, di beberapa sektor menempatkan peran baru bagi militer (strategi peningkatan partisipasi), sementara di sektor lain menginginkan profesionalisme yang tinggi dari militer. Dalam kedua hal ini, pemerintah berusaha untuk mengembangkan kapabilitas sipil untuk berhubungan dengan isu-isu strategis dan kebijakan pertahanan. Besarnya keistimewaan militer yang tercantum dalam konstitusi negara menyebabkan kedudukan militer begitu kuat dalam politik. Badan Keamanan Nasional (COSENA) salah satu lembaga yang mengikutsertakan militer dalam menentukan kondisi darurat negara yang biasanya hanya ditetapkan oleh presiden. Pada masa Frei, meskipun berusaha untuk menghindari konflik dengan militer namun ketika Manuel Contreras dan Pedro Espinoza dijatuhkan hukuman oleh pengadilan karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap Orlando Letelier, mantan duta besar untuk Amerika Serikat pada zaman Allende. Keduanya dilindungi oleh AD dan AL yang kemudian meminta untuk penjara istimewa dan diawasi langsung oleh AD. Karena alasan sakit maka AD meminta penundaan penahanan terhadap Espinoza dan negosiasi untuk menahan keduanya berlangsung rumit. Untuk itu, Frei kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa segala investigasi yang berkaitan dengan kasus cek diakhiri dengan harapan bahwa militer pun menghentikan demonstrasi seribu perwira yang mendukung Espinoza, untuk itu, Pinochet melakukan pertemuan dengan para perwira tersebut dan mengatakan bahwa ketegangan telah berakhir. Dalam hal ini, pemerintahan sipil masih belum mampu memenangkan kebijakan atas militer dan cenderung mendapat tekanan dari militer yang mempertahankan kepentingannya. Pada masa Frei, jabatan Pinochet sebagai panglima AD telah berakhir dan penggantinya Jenderal Ricardo Izurieta, memiliki sikap yang berbeda dengan Pinochet yang menganggap bahwa pelanggaran HAM merusak citra militer dan harus dicari permasalahannya. Hasilnya, pada tahun 2000 dibuatlah dialog yang

mempertemukan militer dan sipil yang dikenal *Mesa de Dialogo* dan militer akan memberikan informasi tentang korban HAM pada masa Rezim Pinochet.<sup>12</sup>

#### e. Hubungan Sipil-Militer Era Ricardo Lagos (2000-2006)

Pada masa Ricardo Lagos, pemerintahan sipil tidak lagi mencampuri lembaga tersebut. Meskipun isu Pinochet masih mewarnai hubungan sipil-militer di Chile pada masa Lagos. Secara pribadi, Lagos mempunyai hubungan yang baik dengan Jenderal Izurieta dan Jenderal Juan Emilio Cheyre (panglima AD yang menggantikan Pinochet). Namun, kedua jenderal tersebut cenderung tidak lagi melakukan perlawanan terhadap pemerintah bahkan Cheyre mengatakan bahwa ke depannya ingin membangun lembaga militer (AD) yang profesional dan tidak ada lagi pelanggaran HAM seperti dahulu.

Pada masa Lagos pula tercapai amandemen terhadap konstitusi tahun 2005 yang mengembalikan wewenang presiden untuk mengangkat dan memberhentikan anggota militer, Badan Keamanan Nasional (COSENA) menjadi penasihat keamanan presiden dan tidak lagi menentukan keadaan darurat serta peran militer tidak lagi sebagai pengawas institusi negara. Pada tahun 2002, Departemen Pertahanan membuat *White Paper of defense* yang di dalamnya merumuskan misi dan peran militer. Kedua hal tersebut dipengaruhi oleh definisi ancaman, dimana ancaman datang dari luar negara mempengaruhi keamanan dalam negeri dan menjadi urusan kepolisian dalam hal ini sementara militer lebih fokus pada keamanan eksternal yang mengganggu wilayah kedaulatan negara. Untuk mendukung profesionalisme militer pemerintah Lagos pun mendukung pembangunan industri militer untuk lebih mengoptimalkan keahlian militer dalam bidangnya. Pembelian peralatan militer gencar dilakukan untuk menggantikan peralatan yang telah usang dan militer pun aktif dalam pergaulan internasional khususnya keikutsertaan sebagai pasukan perdamaian PBB di wilayah konflik.<sup>13</sup>

#### Kesimpulan dan Saran

Perubahan pucuk pimpinan dalam internal lembaga militer dan kebijakan pemerintah yang tidak lagi mempengaruhi kepentingan lembaga militer serta amandemen konstitusi mempengaruhi hubungan sipil-militer di Chile. Militer tidak lagi bertindak melawan kebijakan pemerintah sementara

---

<sup>12</sup> Patricio Silva, *Searching for Civilian Supremacy: The Concertacion Governments and the Military in Chile*, Bulletin of Latin America Research, Vol.21, No. 3, 2002. [www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/1470-9856.00049](http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/1470-9856.00049), diakses 2 Oktober 2007

<sup>13</sup> Book of The National Defense of Chile, [www.defensa.cl/libro\\_2002/ingles/Part%20II.pdf](http://www.defensa.cl/libro_2002/ingles/Part%20II.pdf), diakses pada 22 November 2008.

pemerintah tidak yang mempengaruhi kepentingan lembaga tersebut. Tercapainya militer yang profesional dan tidak lagi memainkan peran dalam wilayah politik adalah wujud dari supremasi sipil yang berhasil memenangkan kebijakan atas militer. Strategi Lagos untuk tidak melakukan intervensi terhadap militer dan komitmen pemimpin-pemimpin militer pasca Pinochet sebagai panglima AD untuk menjadi lembaga yang lebih profesional dan moderen menggambarkan hubungan sipil-militer yang demokratis telah tercapai di Chile.

Hubungan Sipil-Militer memerlukan waktu untuk menjadikannya "baik" dimana militer berada di wilayah profesionalnya. Proses yang terjadi di Chile menjadi contoh bagi negara-negara yang juga memiliki sejarah pernah diperintah oleh militer seperti halnya Indonesia. Pemerintahan sipil harus memiliki strategi untuk mengembalikan militer ke tugas yang seharusnya.

### Daftar Pustaka

Andrew J. Rodhes, *Chilean Civil-Military Relations*, [www.geocities.com/ajrhodes](http://www.geocities.com/ajrhodes).

Diakses 4 Oktober 2006

Book of The National Defense of Chile,

[www.defensa.cl/libro\\_2002/ingles/Part%20II.pdf](http://www.defensa.cl/libro_2002/ingles/Part%20II.pdf) diakses pada 22 November 2008.

Diamond, Larry & Marc F. Plattner (ed.), *Hubungan Sipil-Militer & Konsolidasi*

*Demokrasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, pendahuluan (hal.ix)

Fuentes, Claudio A., *After Pinochet: Civilian Policies Toward the Military in the 1990s Chilean Democracy*, *Journal of Interamerica Studies and World Affairs*, Fall, 2000,

[http://findarticles.com/p/article/mi\\_qa3688/is\\_200010/ai\\_n8922430/pg\\_13-49k-](http://findarticles.com/p/article/mi_qa3688/is_200010/ai_n8922430/pg_13-49k-), diakses 30 Januari 2007

Human Right Watch Briefing Paper, September 2003, *Discreet Path to Justice?*

*Chile, Thirty After the Military Coup*,

[www.hrw.org/background/Americas/chile/chile0903.pdf](http://www.hrw.org/background/Americas/chile/chile0903.pdf) diakses 11 Oktober 2006

Montes, J. Esteban dan Tomas Vial, *The Role of Constitution-Building Processes in*

*Democratization*, [http://www.idea.int/conflict/cbp/upload/CBP-](http://www.idea.int/conflict/cbp/upload/CBP-Chile.pdf)

[Chile.pdf](http://www.idea.int/conflict/cbp/upload/CBP-Chile.pdf) diakses pada 7 Mei 2007

Silva, Patricio, *Searching for Civilian Supremacy : The Concertacion Governments and the Military in Chile*, Bulletin of Latin America Research, Vol.21, No. 3, 2002.

[www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/1470-9856.00049](http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/1470-9856.00049), diakses 2 Oktober 2007

Taylor, Brian D., *Russia's Passive Army, Rethinking Military Coups*, 1999,

[www.csis.org/media/isis\\_pub/ruseus/wp/014/pdf.pdf](http://www.csis.org/media/isis_pub/ruseus/wp/014/pdf.pdf) diakses 23 Mei 2009

Weeks, Gregory *The Military and The Chilean Democracy, 1990-1998*,

[www.168.96.200.17/ar/libros/lasa98/weeks.pdf](http://www.168.96.200.17/ar/libros/lasa98/weeks.pdf), diakses pada tanggal 24 November 2006

Wiarda, Howard J. dan Harvey F. Kline (eds.), *Latin America Politics and Development* Third ed., Boulder, San Francisco & Oxford, 1990.